

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Dummy COVID-19, Gini Ratio, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Belanja Pemerintah Daerah, serta interaksi antara Gini Ratio dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat periode 2012–2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dummy COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat, yang mengindikasikan bahwa ekspansi belanja sosial pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta percepatan layanan kesehatan selama masa pandemi (2020–2023) mampu menjaga tren IPM tetap meningkat meskipun terjadi kontraksi ekonomi.
2. Gini Rasio menunjukkan pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun pengaruh tersebut tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung menurunkan capaian pembangunan manusia. Akan tetapi, secara statistik pengaruh langsung Rasio Gini terhadap IPM belum cukup kuat, sehingga hubungan tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya kapasitas fiskal daerah dalam melakukan intervensi melalui belanja publik.
3. TPAK berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Barat. Ketidaksigifikanan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kuantitas partisipasi angkatan kerja yang didominasi sektor informal dan subsisten belum mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia secara substansial di Kalimantan Barat.
4. Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap IPM, namun tidak signifikan secara langsung, menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah belum terbukti berkontribusi nyata terhadap IPM apabila dilihat sebagai pengaruh yang berdiri sendiri.

5. Interaksi Gini Ratio dan Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Karena pengaruh langsung keduanya tidak signifikan, temuan ini menunjukkan bahwa peran Belanja Pemerintah bersifat sepenuhnya kondisional (*pure moderation effect*): pada wilayah dengan ketimpangan tinggi, peningkatan belanja pemerintah justru berasosiasi dengan penurunan IPM, mengindikasikan alokasi belanja yang belum tepat sasaran ke kelompok terdampak ketimpangan.
6. Secara simultan, Dummy COVID-19, Gini Ratio, TPAK, Belanja Pemerintah Daerah, dan variabel interaksi Gini Ratio dengan Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dibuktikan melalui hasil Uji F yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan sebagai berikut:

a) **Saran Teoritis**

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi IPM namun belum diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti tingkat kemiskinan, pengeluaran per kapita, angka partisipasi sekolah, dan akses layanan kesehatan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah analisis ke tingkat provinsi lain di Kalimantan atau secara nasional, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas dan memberikan kontribusi teoritis yang lebih signifikan bagi pengembangan literatur ekonomi pembangunan regional di Indonesia.

3. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan metode yang lebih beragam, seperti analisis spasial atau pendekatan mixed methods yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai mekanisme transmisi variabel-variabel struktural terhadap pembangunan manusia di tingkat daerah.

b) Saran Praktis

1. Mengingat Gini Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat perlu memprioritaskan kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih terarah, seperti penguatan program bantuan sosial tepat sasaran, perluasan akses pendidikan dan kesehatan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan ekonomi inklusif di kabupaten-kabupaten terpencil yang selama ini tertinggal dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi provinsi.
2. Mengingat Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM serta terbukti mampu memoderasi dampak negatif ketimpangan, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara tepat sasaran menjadi kunci dalam memperluas kapasitas fiskal daerah, terutama bagi kabupaten dengan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat.
3. Mengingat TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, pemerintah perlu beralih dari fokus pada peningkatan kuantitas partisipasi angkatan kerja menuju peningkatan kualitas tenaga kerja. Program pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan Kalimantan Barat, seperti perkebunan, industri pengolahan, dan pariwisata, perlu diperkuat agar peningkatan TPAK dapat berdampak nyata terhadap

standar hidup layak masyarakat dan pada akhirnya mendorong peningkatan IPM secara berkelanjutan.